PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat 1)
The Influence of Tax Compliance To Tax Revenue and Implication On Economic Growth
(*Study Case on Small Taxpayer Office Jawa Barat 1 Region*)

Disusun Oleh:
Ita Rosdiana 2.11.09.060
(email:ita_rosdiana@me.com)
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Development is an attempt for the state to welfare of the population, welfare of the population can be seen quantitatively from achieving high economic growth. High economic growth and sustainable process is the main condition for the sustainability of the economic development of a country. Gross Domestic Product have a significant influence on the amount of tax revenue in Indonesia. Gross Domestic Product increase in this case is Gross Domestic Product increase in Indonesia to then increase the per capita income will always be followed an increase in paying taxes, which in turn will increase the amount of tax revenue for the state. The size tax revenue would strongly influenced by the extent of public awareness in their tax obligations. Therefore, tax compliance is the most important factor of all factors affecting tax revenue. The purpose of this research is to know how much influence tax compliance to tax revenue and implication on economic growth.

The method that been used in this research are descriptive and verifycative methods. The unit of analysis in this research Small Taxpayer Office in Jawa Barat 1 Region. Statistical test used was the calculation of Pearson Product Moment correlation, path analysis, the

coefficient of determination and hypothesis test using SPSS 20 application assistance for Microsoft Windows.

The result of this research showed that tax compliance gave influence in the amount of 48,7% to tax revenue in Small Taxpayer Office in Jawa Barat 1 Region. Then tax revenue gave influence in the amount of 44,4% to economic growth in Small Taxpayer Office in Jawa Barat 1 Region.

Keyword: ***Tax Compliance, Tax Revenue, and Economic Growth***

I. Pendahuluan

Pada intinya peran pemerintah sangat besar dalam menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan perikehidupan masyarakatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi negara dan rakyatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan seimbang (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pembangunan merupakan suatu upaya bagi negara untuk mensejahterakan penduduknya, kesejahteraan penduduk tersebut secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dengan kondisi tersebut maka fungsi pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan berjalan dengan baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran penting dalam proses pembangunan di negara berkembang (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012). Bagi negara sedang berkembang, tujuan kesejahteraan yang layak bagi penduduknya merupakan suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan dengan negara-negara maju (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012).

Istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun (P. Eko Prasetyo,2011). Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya (P. Eko Prasetyo,2011).

Isu mengenai pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan dalam analisis makro ekonomi adalah masalah kelesuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu (Sadono Sukirno, 2011). Telah dinyatakan bahwa pada umumnya berbagai ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada tingkat pertumbuhan yang secara potensial dapat dicapainya (Sadono Sukirno, 2011). Efek dari keadaan tersebut, perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh dan masalah pengangguran merupakan tantangan yang selalu harus dihadapi dan diatasi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2011).

Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan (Rahmananta, 2012). Masih menurut Rahmananta (2012), untuk mengukur pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output dilakukan dengan menggunakan perubahan nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto. Semakin tinggi nilai Produk Domestik Bruto maka pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat melalui penerimaan pajak penghasilan dan pajak lainnya (Rahmananta, 2012).

Produk Domestik Bruto memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak di Indonesia. Peningkatan Produk Domestik Bruto dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kemudian meningkatkan pendapatan per kapita yang akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara (Rahmananta, 2012).

Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Untuk menjalankan roda

pemerintahan, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat (Waluyo, 2013). Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Thomas Sumarsan. 2013). Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulend (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Dilihat dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran-pengeluaran rutin (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012). Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (regulend), maka pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pembangunan negara (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012).

Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012). Berbagai faktor ekonomi makro, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha dapat mempengaruhi penerimaan pajak, namun sebagaimana dinyatakan oleh Trivedi and Lynn (2003), bahwa kepastian adanya kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan pajak adalah faktor yang terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012). Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012).

Dalam upaya melaksanakan fungsi dan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak dihadapi oleh 3 masalah yang perlu dicermati untuk diselesaikan, salah satunya adalah masih minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Dedi Rudaedi, 2012).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Sistem pemungutan yang berlaku adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam sistem self assessment yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan melaksanankan kewajiban pajaknya secara mandiri (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Secara sederhana kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012).

Maksud penulis melakukan penelitian ini semata-mata adalah untuk maksud rencana penyusunan skripsi. Adapun pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak dan

Pertumbuhan Ekonomi. Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan implikasinya pada Pertumbuhan Ekonomi pada KPP Pratama Wilayah Jawa Barat 1.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya" (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2003).

Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan (John Hutagaol, 2007).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu (Iskandar Putong, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan (Schumpeter dalam Iskandar Putong, 2013).

III. Objek dan Metode Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1. Mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan yaitu Untuk Mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan Implikasinya pada Pertumbuhan Ekonomi.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui seberapa besar hubungan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2011). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variable penelitian.

Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan (Mashuri dalam Umi Narimawati dkk 2010). Adapun design penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1. Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen (gambar 3.1).

Untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka diperlukan operasionalisasi variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh melalui pengukuran variabel -variabel penelitian (tabel 3.2).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Studi Kepustakaan *(Library Reseach).* Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa

Barat I. Sampel dalam penelitian ini adalah Populasi yang digunakan dalam penelitian atau dengan kata lain sampel dalam penelitian ini memakai seluruh populasi yang ada atau dapat disebut dengan Sensus.

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dan implikasinya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis jalur.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi dilakukan untuk menentukan keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan dari data sampel, bukan data sensus (Cooper and Schindler 2006). Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien jalur variabel yang sedang diuji tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur variabel yang sedang diuji sama dengan nol maka Ho diterima.

Menetapkan Hipotesis

H01 = 0, Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H11 $\neq$ 0, Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H02 = 0, Penerimaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H12 $\neq$ 0, Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada sub struktur yang pertama variabel kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel independen dan penerimaan pajak berperan sebagai variabel intervening. Karena variabel independen hanya satu (kepatuhan wajib pajak) maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS.20 diperoleh nilai koefisien korelasi dapat dilihat bahwa keterkaitan atau hubungan antara kepatuhan wajib pajak (X) dengan penerimaan pajak (Y) sebesar 0,698 dan masuk dalam kategori kuat.

Nilai koefisien jalur sebesar 0,698 merupakan nilai koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak (tabel 4.5). Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,487 diinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 48,7% terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1 (tabel 4.6). Sementara sisanya sebesar 51,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi, denda, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan.

Karena nilai koefisien jalur 0,698 lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan H11 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta, 2007), (Suryadi, 2006), dan (Euphrasia Susy Suhendra, 2010).

Pada sub struktur yang kedua variabel penerimaan pajak berperan sebagai variabel intervening dan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel dependen. Karena variabel intervening (penerimaan pajak) hanya satu, maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS.20 diperoleh nilai koefisien korelasi dapat dilihat bahwa keterkaitan atau hubungan antara penerimaan pajak (Y) dengan pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 0,666 dan masuk dalam kategori kuat.

Nilai koefisien jalur sebesar 0,666 merupakan nilai koefisien jalur penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (tabel 4.7). koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,444 diinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini

diketahui bahwa penerimaan pajak memberikan pengaruh sebesar 44,4% terhadap pertumbuhan ekonomi pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1 (tabel 4.8). sementara sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penerimaan pajak antara lain kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih, dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern.

Karena nilai koefisien jalur 0,666 lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan H12 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Worlu, Christian N (2012).

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin patuh wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Masalah yang terjadi pada penerimaan pajak seperti penerimaan pajak belum optimal dan tidak mencapai target disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Sehingga jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin besar penerimaan pajak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Masalah yang terjadi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menyerap tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang belum optimal dan tidak mencapai target. Sehingga jika

penerimaan pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun ikut meningkat.

b. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak DJP perlu melakukan sensus nasional sebagai program penggalian potensi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dan pencapaian target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan DJP disarankan untuk mengejar penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground*) yang selama ini tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional. Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus melakukan ekstensifikasi dengan kajian yang ada dan melihat sektor-sektor pajak yang gemuk.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan sektor manufaktur, pertanian dan pertambangan karena untuk saat ini yang paling banyak berkontribusi adalah di sektor perdagangan dan jasa, menumbuhkan produktifitas tenaga kerja dan menambahkan jumlah serapan tenaga kerja, menjaga angka investasi agar bisa memperbaiki sektor keuangan supaya perbankan dan lembaga keuangan lebih membuka diri terhadap masyarakat yang butuh permodalan untuk meningkatkan kapasitasnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi.
3.

VI. Daftar Pustaka

Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. *Business Research Methods.*(9^{th} ed.). International edition. Mc Graw Hill.

Dedi Rudaedi. 2012. *Ke depan DJP Perlu Mengoptimalkan Segala Strategi agar Semakin Dipercaya Masyarakat, Baik Kebijakan yang Sesuai dengan Kondisi Sekarang Maupun Pembenahan Struktur Organisasi.*

http://www.infobanknews.com/2012/08/penerimaan-pajak-masih-terhambat-3-masalah/ Rabu 8 Agustus 2012 09:35 WIB.

Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010.

Iskandar Putong. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.

John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntabilitas, Maret 2007, hal. 186-193 Vol. 6, No. 2.

P. Eko Prasetyo. 2011. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.

Rahmananta. 2012. *Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.* QE Journal Vol.01 - No.01 – 28 2012.

Sadono Sukirno.2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1, April 2006 Hal 105-121.

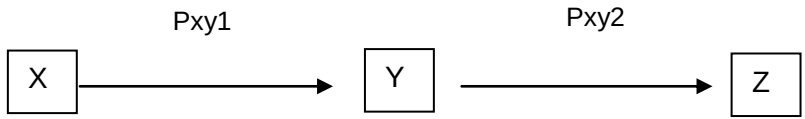
Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Depok: Raih Asa Sukses.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Penerbit Ganesis.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta:Salemba Empat.

Worlu, Christian N. 2012. *Tax Revenue and Economic Development in Nigeria : A Macroeconometric Approach*. Academic Journal of Interdisciplinary Studies Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome Vol 1 No 2 November 2012 E-ISSN 2281- 4612 ISSN 2281-3993.

VII. Lampiran



Gambar 3.1
(Model Analisis Jalur)

Keterangan :

X = Kepatuhan Wajib Pajak
Y = Penerimaan Pajak
Z = Pertumbuhan Ekonomi
Pxy1 = Koefisien jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Pxy2 = Koefisien jalur Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	Metode yang digunakan	Unit analisis	Time Horizon

T-1	*Descriptive dan verifikative*	*Verifikatif*	Kantor Pelayanan Pajak	*Cross Sectional*
T-2	*Descriptive dan verifikative*	*Verifikatif*	Kantor Pelayanan Pajak	*Cross Sectional*

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Keapatuhan Wajib Pajak (X)	"Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberiathuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir". (Siti Kurnia Rahayu 2010:139)	Jumlah nominal pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang terbit pada tahun 2011	Rasio
Penerimaan Pajak (Y)	"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan	Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2011	Rasio

	negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan". (Suryadi,2003:1)		
Pertumbuhan Ekonomi (Z)	"Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan". (Schumpeter dalam Iskandar Putong, 2013:1)	Laju Produk Domestik Regional Bruto	Rasio

Tabel 4.5
Koefisien jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.155E+11	3.312E+11		-.349	.733
	X	67.615	18.553	.698	3.644	.003

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.6
Koefisien determinasi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698[a]	.487	.450	891291279837.62570

a. Predictors: (Constant), X

Tabel 4.7
Koefisien Jalur Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14816078.89	1364643.018		10.857	.000
	Y	3.258E-006	.000	.666	3.341	.005

a. Dependent Variable: Z

Tabel 4.8
Koefisien determinasi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666[a]	.444	.404	4538695.39502

a. Predictors: (Constant), Y S